

"SEPINTAS TENTANG ARTI KEBEBASAN MANUSIA DAN PERANANNYA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN MORAL

Oleh : A. Dardiri *

1. Arti Kebebasan

Kata "bebas" atau "kebebasan" telah lama menjadi pembahasan para ahli, baik di bidang moral, hukum maupun di bidang politik. Istilah yang digunakan adalah istilah "liberty" dan "freedom" (4, 1964, p. 266 - 267).

Menurut Robert K. Woetzel (13, 1966, p. 7) masalah kebebasan sudah bukan semata-mata menjadi pembahasan para filsuf, tetapi juga para ahli politik, sosial dan ekonomi. Hal ini sudah tentu mengakibatkan pengertian kebebasan menjadi bermakna ganda sebagaimana dikemukakan oleh Harold H. Titus (11, 1984, p. 97) bahwa istilah kebebasan mengandung empat pengertian, yaitu :

- a. Kekuatan untuk memakai tenaga sendiri tanpa batas dari luar, seperti kebebasan untuk bergerak.
- b. Kebebasan sosial ekonomi yang dikenal dalam pengertian individualisme dan kolektivisme.
- c. Kebebasan juga berarti kemerdekaan warga negara untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dan memilih agamanya.
- d. Kebebasan moral yang berarti kebebasan untuk memilih antara beberapa alternatif bagi perbuatan. Kebebasan moral dahulu dikenal dengan sebutan kehendak bebas.

Franz Von Magnis dalam karyanya "Etika Umum" (6, 1975, p. 47) juga mengemukakan mengenai pengertian kebebasan yang beraneka ragam. Menurut Von Magnis, kebebasan mempunyai tiga pengertian yaitu :

- a. Kebebasan jasmaniah, maksudnya adalah tidak adanya paksaan terhadap kemungkinan-kemungkinan kita untuk menggerakkan badan kita, misalnya terhadap kemungkinan untuk pergi ke pasar, untuk berteriak, untuk memegang buku. Jangkauan kebebasan ini ditentukan oleh kemampuan badan kita sendiri.

* Alumnus Fakultas Filsafat UGM dan sekarang staf pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA.

- b. Kebebasan kehendak, maksudnya adalah kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, dan karena manusia dapat memikirkan apa saja maka ia dapat menghendaki apa saja.
- c. Kebebasan moral, maksudnya adalah tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan dan lain desakan yang tidak sampai berupa paksaan fisik.

Terhadap pandangan Von Magnis, penulis sendiri tidak sependapat bila kebebasan kehendak dipisahkan dengan kebebasan moral, sebab dalam kenyataannya, kehendak bebas seseorang dapat mempengaruhi penilaian moral seseorang. Bila dalam melahirkan tindakannya itu seseorang tidak didorong oleh kehendaknya yang bebas, maka orang tersebut tidak dapat dinilai secara moral. Penilaian moral baru dapat dijatuhkan hanya kepada tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja, dengan kehendak atau karsanya yang bebas. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Harold H. Titus sebagaimana telah diterangkan di atas.

Sebenarnya ada dua cara untuk menerangkan kebebasan, yakni dengan cara positif, maksudnya menerangkan kebebasan manusia dengan menggunakan rumusan "bebas untuk". Cara pertama ini dapat kita lihat pada pernyataan "Dia bebas untuk memilih tindakan mana yang ia sukai". Sedangkan cara yang kedua disebut cara negatif, maksudnya menerangkan kebebasan manusia dengan menggunakan rumusan "bebas dari". Cara yang kedua ini dapat kita lihat dalam pernyataan "Dia bebas dari ancaman seseorang" (12, 1962, p. 22).

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada keterangan terdahulu bahwa dalam tulisan ini penulis hanya akan memfokuskan masalah kebebasan dalam arti moral. Kebebasan dalam arti moral atau dengan singkat kebebasan moral dapat dirumuskan dengan cara positif yaitu kemampuan manusia dalam memilih beberapa alternatif tindakan. Dan bila dirumuskan secara negatif, kebebasan moral berarti tidak adanya paksaan atau ancaman dalam melahirkan tindakannya. Dan bila dirumuskan dengan dua cara sekaligus maka kebebasan moral berarti kemampuan manusia di dalam memilih beberapa alternatif tindakan secara merdeka (artinya dengan tidak dipaksa).

Von Magnis cenderung menerangkan kebebasan dengan cara negatif, dengan alasan karena menerangkan kebebasan dengan cara negatif lebih mempunyai arti empiris. (6, 1975, p. 45)

2. Kapan seseorang disebut bebas

Untuk menjawab pertanyaan kapan seseorang disebut bebas, S.I. Ben dan R.S. Peters merumuskan sebagai berikut :

"In general, when we say that a person is free, we mean that, if a person wants to do something, he will not be impeded by some kind of constraint or limitation . . ." (9, 1964, p. 230).

Dengan memperhatikan keterangan tersebut jelaslah bagi kita bahwa seseorang disebut bebas bila tidak ada atau tidak terdapat faktor-faktor yang merintangi. Faktor-faktor yang dimaksud dapat berupa :

- a. Kurangnya pengetahuan, seperti misalnya : saya tidak dapat mematikan mesin motor, karena saya tidak mengetahui tentang permesinan.
- b. Kurangnya kemampuan, seperti misalnya : saya tidak dapat menyelamatkan orang yang tenggelam, karena saya tidak dapat berenang.
- c. Kurangnya alat, seperti misalnya : saya tidak dapat membelikan kamu sepeda, karena saya tidak mempunyai uang.
- d. Kelemahan fisis, seperti misalnya : saya tidak dapat mencapai puncak rak buku, karena saya tidak cukup tinggi. Saya tidak dapat berpikir lurus karena saya sakit.
- e. Kelemahan psikologis, seperti misalnya : saya tidak dapat tidur di tempat yang berbulu, karena saya takut kepada bulu.
- f. Ancaman, seperti misalnya : saya harus menanda tangani cek, karena saya diancam dengan pistol.
- g. Paksaan, seperti misalnya : saya terpaksa meninggalkan rumah saya karena diserbu. (10, 1960, p. 83-84).

Sudah barang tentu bila ditanyakan kapan seseorang disebut bebas secara moral, tentu jawabannya : bila di dalam melahirkan pilihannya itu tidak dipaksa atau terpaksa dan tidak pula diancam. Dengan rumusan yang positif, seseorang disebut bebas bila di dalam dirinya ada kekuatan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut ketentuan kemauan atau kehendak (5, 1965, p. 267).

Bila di dalam kenyataan, seseorang di dalam melahirkan tindakannya tidak didorong oleh karsanya atau kehendaknya yang bebas, atau dengan kata lain dipaksa atau diancam, maka tindakannya tersebut tidak dapat dinilai secara moral. Karena tindakan manusia dapat mempunyai arti moral bila tindakan tersebut lahir dengan karsanya yang bebas, tanpa ada paksaan atau ancaman.

3. Benarkah manusia itu bebas

Banyak buku modern dalam bidang etika menghilangkan diskusi tentang free will dan determinisme. Hal ini menurut hemat penulis dapat dimaklumi, karena persoalan tersebut telah dibicarakan dan hasilnya juga belum memuaskan. Namun setiap kita membicarakan masalah kebebasan manusia, mau tak mau terusik juga untuk membicarakan persoalan apakah manusia itu bebas atau tidak. Dan sudah tentu membicarakan juga pertentangan antara free will dan determinisme.

Harold H. Titus (11, 1984, p. 99—109) dalam membahas persoalan ada atau tidak adanya kebebasan manusia mengajukan tiga pandangan, yakni:

- a. Determinisme
- b. Indeterminisme (free will)
- c. Self-Determinisme

Determinisme adalah suatu teori atau pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu dalam alam ini termasuk manusia diatur oleh hukum sebab akibat. Apa saja yang terjadi pada suatu waktu adalah hasil dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kebebasan dalam arti pilihan pribadi adalah suatu ilusi.

Teori ini akan nampak jelas dalam sebuah contoh yang diberikan oleh seorang determinis sebagai berikut:

"Marilah kita membayangkan seorang tabib yang memeriksa seorang pasien dengan teliti, dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak dapat menolongnya karena si sakit menderita suatu penyakit yang aneh, yaitu penyakit yang tidak mempunyai sebab. Dalam keadaan semacam itu orang akan membenarkan si pasien jika ia marah dan pergi ke dokter lainnya. Jika dokter tersebut hanya mengatakan ia tidak pernah menemukan penyakit seperti itu sebelumnya, dan karena itu tidak mengetahui sebabnya, kita tidak akan menganggap keterangannya absurd (tidak masuk akal). Kita dapat menerima pendapat bahwa ada penyakit yang belum diketahui sebabnya. Tetapi kita tidak dapat menerima bahwa ada penyakit yang tidak ada sebabnya". (11, 1984, p. 99).

Melihat contoh tersebut jelas bahwa determinisme berpegang teguh pada prinsip ilmiah. Dalam dunia sains misalnya berasumsi bahwa setiap benda itu ditetapkan (disebabkan). Di dalam logika formal tradisional ada sebuah prinsip dasar berpikir, yang berasal dari seorang filsuf yang bernama Leibnitz, yaitu prinsip cukup alasan, yang dalam bahasa

Latin disebut "*principium rationis sufficientis*". Prinsip ini mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi pasti disertai alasan yang cukup. Dengan kata lain, segala hal yang terjadi pasti bersebab. Hal ini berarti jika sesuatu hal terjadi tanpa bersebab, tanpa alasan yang cukup, maka hal itu tidak masuk akal (tidak logis).

Juga, Spinoza dan Hobbes pernah mengatakan bahwa manusia seperti batu-batuan dan arloji merupakan suatu sistem mekanik alam dan bahwa seluruh tindakannya ditentukan (terbatas) (9, 1964, p. 231). Bahkan pernyataan Henri Poincaré memperkuat anggapan bahwa determinisme itu berlaku di kalangan para ilmuwan. Henri Poincaré mengatakan "*science is determinist; it is so a priori, it postulates determinism, because without this postulates science could not exist*" (4, 1964, p. 269).

Dalam teologi Islam dikenal pula aliran Jabariyah, yang pandangannya mengenai kebebasan manusia menyerupai determinisme, namun determinisme dalam teologi Islam lebih bercorak religius. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa sejak semula perbuatan manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak mempunyai kemauan atau kehendak bebas. Bukanlah perbuatan-perbuatan manusia itu timbul dari daya upaya manusia sendiri. Manusia menurut aliran ini sama sekali tidak mempunyai kebebasan, bagaikan wayang yang hanya bergerak jika digerakkan oleh sang dalang (7, 1975, p. 86—87).

Dalam indeterminisme lain lagi. Indeterminisme adalah suatu teori atau pandangan yang mengatakan bahwa bagian-bagian alam ini mempunyai kemampuan besar untuk bermain secara bebas (*loose play*). Dengan ungkapan lain, tidak semua benda itu terikat dengan hukum sebab akibat. Mengapa? Sebab terdapat pluralisme yang sungguh-sungguh dalam watak benda; terdapat kemungkinan-kemungkinan dalam masa yang akan datang. Kemungkinan itu lebih banyak daripada keadaan sekarang dalam beberapa segi (11, 1984, p. 105). Salah satu tokoh dari aliran ini adalah William James (1842—1910) seorang pemikir yang dilahirkan di New York City. William James terkenal sebagai seorang filsuf Amerika yang dengan kuat menyiarkan teori kebebasan kehendak (*free will*) atau disebut juga indeterminisme. Menurut James dalam esainya "*The Dilemma of Determinism*" sebagaimana dikutip oleh Harold. H. Titus (1984, p. 105) menunjukkan bagaimana rasa menyesal serta tragedi seperti pembunuhan membawa suatu teka-teki bagi pengikut determinisme. Jika pembunuhan itu sudah dipastikan oleh seluruh alam, maka rasa menyesal menjadi tidak tepat (merupakan

kebodohan). James selanjutnya mengatakan ... Apakah yang kita rasakan setelah mendapatkan jalan yang benar, apakah yang kita rasakan setelah mendapatkan kegembiraan atau kenikmatan? Semua itu tidak dapat kita rasakan kecuali jika kita merasakan juga bahwa jalan yang salah itu juga mungkin dan juga wajar, meskipun berbahaya dan mengkhawatirkan. Dan apakah artinya jika kita mempersoalkan diri kita, karena memilih jalan yang salah, kecuali jika jalan yang benar juga dapat kita tempuh.

Demikianlah cara kaum indeterminist menerangkan adanya pilihan bebas pada manusia dan sekaligus menangkis anggapan kaum determinist yang sangat tertutup terhadap kemungkinan-kemungkinan, karena sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam teologi Islam dikenal aliran Mu'tazilah dan Qadariyah (7, 1975, p. 87-88), keduanya berkeyakinan bahwa Tuhan telah memberikan kebebasan memilih dan bertindak kepada manusia. Hal ini berarti bahwa kodrat dan iradat Tuhan bagi mereka sudah tidak mutlak lagi, karena Tuhan telah memberikan daya pilih dan daya tindak kepada manusia. Atas dasar pendapat tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan daya pilih dan daya tindaknya adalah atas usaha manusia sendiri dan bukan merupakan hasil dari kodrat dan iradat Tuhan. Di tengah-tengah pertentangan antara determinisme di satu pihak dan indeterminisme (*free will*) di lain pihak, terdapat sikap atau pandangan yang ketiga, yang berusaha mendamaikan kedua pandangan tersebut. Pandangan yang kompromistis ini disebut "Self Determinisme" yaitu suatu sikap atau pandangan yang menekankan aku sebagai penyebab, yang merupakan pusat kreativitas dan memiliki kebebasan memilih.

Self-determinisme menolak determinisme, karena teori ini (determinisme) menolak kebebasan manusia dan dengan sendirinya juga menolak pertanggungjawaban moral. Self-determinisme juga menolak indeterminisme dalam hal keputusan-keputusan yang tidak ada hubungannya dengan faktor sebab. Self-determinisme dapat menerima determinisme, karena determinisme dalam salah satu bentuknya adalah asumsi ilmiah yang sangat penting. Tindakan manusia misalnya, berdasarkan sekelompok syarat dan akan kehilangan artinya jika dipisahkan dengan syarat tersebut.

Pandangan ketiga ini juga dapat menerima indeterminisme dalam hal adanya kebebasan manusia. Manusia menurut pandangan ketiga merupakan suatu makhluk yang sadar akan akunya (11, 1984, p. 108) atau dengan istilah yang per-

nah dikemukakan oleh Sartre untuk menunjukkan keberadaan manusia sebagai "Being-For-itself" (L'Etre-Pour-soi) makhluk yang sadar akan keberadaannya. (8, 1953, p. 3). Manusia menurut pandangan ketiga adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berinisiatif dan meresponse, dan bahwa ia juga merupakan pusat kreativitas dan sampai batas tertentu ia mampu membentuk dirinya, mempengaruhi tingkah laku teman-temannya dan memberi arah yang baru kepada proses dunia luar. (11, 1984, p. 108).

Usaha pendamaian antara determinisme dan indeterminisme juga diusulkan oleh Hazlitt dalam karyanya "The Foundation of Morality" (1964, p. 277) bahwa apa yang dikatakan oleh determinisme benar bahwa di dalam alam ini terdapat hukum sebab akibat, namun di dalam alam ini juga terdapat kebebasan manusia. Bila dikatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan itu tidak berarti manusia bebas dari hukum sebab akibat, tetapi bebas dari paksaan.

Dalam teologi Islam, kita kenal aliran Ahlussunnah wal-Jama'ah yang berusaha menjembatani pertentangan antara Jabariyah (determinisme) di satu pihak dan Qadariyah dan Mu'tazilah (indeterminisme) di lain pihak. Menurut Ahlussunnah wal-Jama'ah, manusia adalah bebas dalam keterikatannya, bebas tetapi tidak mutlak. Di dalam kehidupan memang ada lapangan taqdir Tuhan dan ada pula lapangan usaha manusia. Hanya saja manusia tidak mengetahui di mana batasnya. Manusia dapat mengetahui setelah peristiwa yang dipersiapkan selesai. Saat itu manusia dapat meraba-raba di mana batas usaha manusia dan di mana taqdir Tuhan itu berlaku (2, 1976, P. 147). Menurut Ahlus Sunnah selanjutnya, kebebasan yang dimiliki oleh manusia hanya mengenai usahanya untuk memperoleh sesuatu perbuatan dan bukan kebebasan untuk menciptakan sesuatu perbuatan, karena yang menciptakan sesuatu perbuatan manusia adalah Tuhan. Manusia sekedar berusaha untuk memperolehnya dan tidak memastikan dirinya untuk dapat meraih apa yang dikehendakinya (3, 1974, p. 113).

Menurut hemat penulis, determinisme gagal dalam memperhitungkan unsur-unsur penting di dalam pengalaman manusia. Indeterminisme juga gagal dalam memperhitungkan kondisi lingkungan dan pembawaan, dan menjadikan perbuatan tidak menentu. Bila pertanyaan "benarkah manusia itu bebas? Maka jawabannya, memang manusia itu memiliki kebebasan moral, sebab bila tidak memiliki kebebasan moral, maka pertanggung jawaban moral juga tidak ada. Kebebasan dalam arti moral merupakan "sine qua non" bagi adanya pertanggung jawaban.

4. Di mana letak pentingnya kebebasan manusia

Dengan menjawab pertanyaan tentang pentingnya kebebasan manusia berarti sudah meyakini bahwa kebebasan manusia itu memang ada. Namun keyakinan itu perlu dibuktikan kebenarannya.

Adapun bukti-bukti yang memperkuat adanya kebebasan manusia dalam arti moral adalah sebagai berikut:

a. Rasa kesadaran yang langsung. Kenyataannya, semua orang mempunyai kesadaran yang langsung dan jelas tentang kebebasannya. Mereka percaya bahwa mereka mampu memilih di antara beberapa alternatif tindakan. Setelah bertindak biasanya mereka merasa bahwa mereka mestinya dapat melakukan pilihan lain. Ini merupakan fakta pengalaman yang harus diakui.

b. Rasa Tanggung Jawab Pribadi

Rasa tanggung jawab pribadi yang diekspresikan secara sangat jelas dalam perasaan kewajiban atau rasa "harus" akan tidak berarti jika kita mengingkari kemampuan untuk memilih. Setelah melakukan beberapa tindakan kita berkata "saya tidak melakukan tindakan yang lain". Tetapi anehnya, setelah melakukan tindakan yang lainnya kita pun berkata, "seharusnya saya melakukan tindakan yang lain", atau "seharusnya aku memilih yang lain". Kalau kebebasan itu merupakan realitas dan manusia mempunyai kekuatan untuk melakukan pilihan lain, maka rasa "harus" menjadi penting dan berarti.

c. Pertimbangan moral terhadap tindakan dan budi pekerti manusia.

Semua pertimbangan tentang tindakan dan budi pekerti mendasarkan diri bahwa manusia itu pelaku moral yang bebas. Semua pertimbangan apakah ia seorang yang berlaku etis atau tidak, terpuji atau tercela juga mengasumsikan bahwa manusia itu bebas memilih.

d. Fakta Pemikiran.

Pemikiran dan pertimbangan akan tidak berarti jika tidak terdapat kebebasan yang cukup memungkinkan orang untuk memilih satu dari dua atau tiga alternatif. Dengan berfikir, seseorang dapat menempatkan di mukanya beberapa kemungkinan untuk bertindak. Ia mungkin memikirkan akibat kemungkinan tindakan pertama, kemudian akibat tindakan lainnya. Kadang-kadang seseorang berhenti berpikir sebelum ia bertindak. Sebagai akibat dari pemikiran tersebut ia mungkin memilih suatu tindakan yang ia tidak akan memilih seandainya ia tidak berpikir lebih dulu. (11, 1984, p. 109 - 112).

Dengan mengemukakan bukti-bukti adanya kebebasan memilih pada manusia, nampak semakin terang letak pentingnya kebebasan manusia. Lebih-lebih jika kita hubungkan dengan masalah pertanggungjawaban akan semakin penting peranan kebebasan manusia itu, karena tanpa ada kebebasan dalam diri manusia maka akan tidak mungkin kita berbicara tentang tanggung jawab. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap hasil tindakannya, bila dalam diri orang tersebut memang ada kemampuan untuk memilih beberapa alternatif tindakan secara merdeka. Dalam kaitan ini Ahmad Amin (1, 1977, p. 67) menandakan bahwa sekiranya kehendak manusia itu tidak bebas di dalam memilih kebaikan dan keburukan tentu kewajiban moral serta perintah dan larangan tidak ada gunanya dan tidak ada artinya pahala dan siksa, pujian dan celaan. Bila persoalan ini dikaitkan dengan Tuhan, maka seorang yang bersikap indeterministik dalam arti mengakui adanya kehendak bebas manusia akan mengatakan : rasanya tidak adil bila Tuhan meminta pertanggung jawaban kepada manusia kalau dalam diri manusia itu tidak diberi kebebasan untuk memilih beberapa alternatif tindakan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Amin, Ahmad, **Al Akhlak**, dialihbahasakan oleh K.H. Farid Ma'ruf, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
2. Gazalba, Sidi, **Ilmu Islam I** (Asas Ajaran Islam), Bulan Bintang Jakarta, 1976.
3. Hanafi, A., **Pengantar Theolgy Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
4. Hazlitt, Henry, **The Foundation of Morality**, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey, 1964.
5. Huxley, Sir Julian, et al. (ed). **Growth of Ideas**, Macdonald, London, 1965.
6. Magnis Franz Von, **Etika Umum**, masalah-masalah pokok filsafat moral, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1975.
7. Nasution, Harun, **Filsafat Agama**, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
8. Sartre, Jean Paul, **Existential Psychoanalysis**, translated and with an Introduction by Hazel E. Barnes, Philosophical Library, New York, 1953.
9. S.I. Benn and R.S. Peters, **The Principles of Political Thought**, Colliet Books, New York, 1964.
10. Spargue, Elmer, **What is Philosophy, A Short Introduction**, Oxford University Press, London, 1960.
11. Titus, Harold H. et al. **Persoalan-persoalan Filsafat**, dialihbahasakan oleh H.M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
12. Tufs, J.H., "Ethics", dalam Dagobert D. Runes and 22 authorities, **Living School of Philosophy**, Littlefield, Adams & Co, Peterson, New Jersey, 1962.
13. Woetzel Robert K., **The Philosophy of Freedom**, Popular Library, Inc., New York, 1966.